KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL

TRIWULAN II 2021

Pengarah : Tri Budhianto
Penanggung jawab : Wayan Juwena
Ketua : Bahrul Ulum
Anggota : Seluruh Pejabat/Pegawai Bidang PPA2

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

DAFTAR ISI

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL		**1**
A.	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	1
B.	INFLASI	2
C.	INDIKATOR KESEJAHTERAAN	3
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN		**6**
A.	PENDAPATAN NEGARA	7
B.	BELANJA NEGARA	9
C.	PROGNOSIS REALISASI APBN	14
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD		**15**
A.	PENDAPATAN DAERAH	16
B.	BELANJA DAERAH	20
C.	PROGNOSIS REALISASI APBD SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2021	21
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)		**22**
A.	LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN	22
B.	PENDAPATAN KONSOLIDASIAN	22
C.	BELANJA KONSOLIDASIAN	24
D.	ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	26
V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH		**28**
A.	SEKTOR PERTANIAN DI BALI MULAI PULIH	28
B.	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI BALI TETAP BERJALAN DI TENGAH PANDEMI	30

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1

HAnDAL

Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

PDRB adalah penjumlahan nilai *output* bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah dan dalam satu kurun waktu tertentu. PDRB dapat dilihat dari sisi produksi (lapangan usaha) dan dari sisi konsumsi (konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan belanja Pemerintah). Kebijakan fiskal Pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD maupun alokasi dana APBN di daerah merupakan salah satu variabel pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan II 2021

Sumber: BPS Provinsi Bali

Total perekonomian Bali pada Triwulan II-2021 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp56,41 triliun, atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tercatat sebesar Rp36,82 triliun. Dengan demikian, Bali pada Triwulan II-2021 tercatat tumbuh sebesar 5,73% *(q-to-q)* jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I-2021. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya *(y-on-y)*, ekonomi Bali Triwulan II-2021 tercatat tumbuh sebesar 2,83%.

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Bali pada Triwulan II-2021 didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tercatat berkontribusi sebesar 17,03%. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 54,04%. Jika diakumulasikan pertumbuhan Triwulan I-2021 dan Triwulan II-2021, maka selama semester I-2021, ekonomi Bali tercatat tumbuh negatif atau terkontraksi sedalam -3,73% *(c-to-c)*. Struktur PDRB Bali pada Triwulan II-2021 mayoritas disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga sebesar 54,04%, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sebesar 29,23%, dan konsumsi Pemerintah sebesar 12,63%. Apabila diperhatikan perubahannya dibandingkan Triwulan I-2021, Pertumbuhan konsumsi

Pemerintah tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 86,51%, diikuti ekspor luar negeri 2,78%, dan konsumsi rumah tangga sebesar 0,81%.

B. INFLASI

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Untuk wilayah Bali, inflasi dipotret dari 2 wilayah yaitu Denpasar dan Singaraja.

Grafik Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja

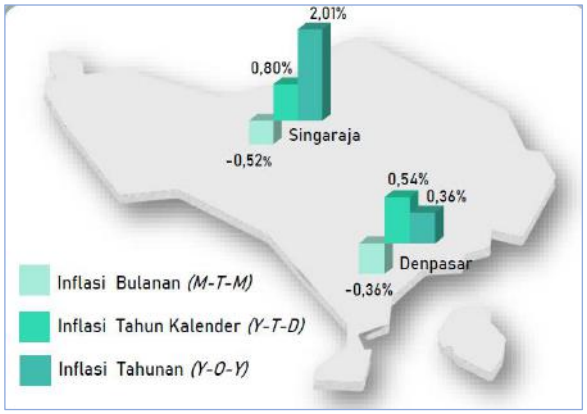

Sumber: BPS Provinsi Bali

Pada bulan Juni 2021, Kota Denpasar tercatat mengalami deflasi sedalam 0,36% yang ditunjukkan dengan penurunan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 105,16 pada Mei 2021 menjadi 104,78 pada Juni 2021. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender *(year to date/ytd)* setinggi 0,54% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2021-Juni 2020) sebesar 0,36% *(yoy)*. Sedangkan di Singaraja tercatat mengalami deflasi sedalam 0,52% dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 107,05. Tingkat inflasi tahun kalender *(ytd)* setinggi 0,80%, sementara tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2021-Juni 2020) sebesar 2,01% *(yoy)*.

Menurut kelompok pengeluarannya, Denpasar dan Singaraja mencatat kelompok yang sama sebagai penyumbang deflasi terbesar, yaitu pada kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau), dengan deflasi masing-masing sedalam 2,27% dan 2,44%. Sementara itu, kelompok yang mengalami inflasi di Denpasar dan Singaraja tercatat cukup mirip, dengan dominasi pada kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga); kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya); dan kelompok VI (transportasi).

Komoditas yang memberikan sumbangan deflasi pada bulan Juni 2021 di Denpasar antara lain daging ayam ras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, mangga, semangka, pisang, baju kaos berkerah pria, jeruk, dan tomat. Sedangkan di Singaraja lebih banyak dipicu oleh komoditas cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang merah, nangka muda,

kangkung, apel, ikan tongkol, tongkol diawetkan, kol putih/kubis, tomat, pisang, jahe, semangka, rampela hati ayam, kacang merah/joglo, cumi-cumi, sawi hijau, dan salak.

C. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

1. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidak-mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Bali pada Maret 2021 tercatat sebesar 4,53%, meningkat 0,08% dibandingkan dengan posisi September 2020 yang tercatat sebesar 4,45%. Jumlah penduduk miskin di Bali pada Bulan Maret 2021 tercatat sekitar 201,97 ribu orang. Bertambah 5,05 ribu orang dibandingkan jumlah penduduk miskin pada September 2020 yang tercatat sekitar 196,92 ribu orang. Selama periode September 2020 s.d. Maret 2021, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat mengalami peningkatan, dari 4,04% menjadi 4,12%. Hal yang sama juga terjadi di daerah perdesaan, tercatat persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami peningkatan dari 5,40% pada September 2020 menjadi 5,52% pada Maret 2021.

Grafik Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali

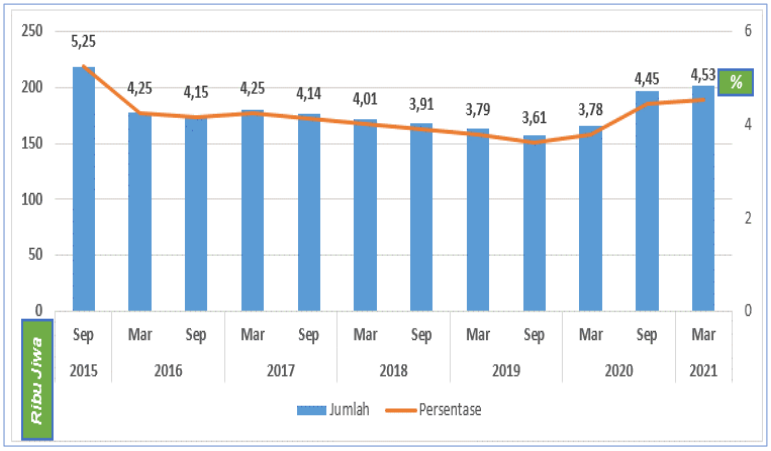

Sumber: BPS Provinsi Bali

Garis kemiskinan tercatat naik sekitar 3,21%, dari Rp438.167,00 per kapita per bulan pada September 2020 menjadi Rp452.221,00 per kapita per bulan pada Maret 2021. Ketimpangan pendapatan di Bali yang digambarkan dengan Gini Ratio kondisi Maret 2021 sebesar 0,378 naik 0,009 poin dari kondisi September 2020 yang tercatat sebesar 0,369.

2. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia

Grafik Presentase Pengangguran di Bali

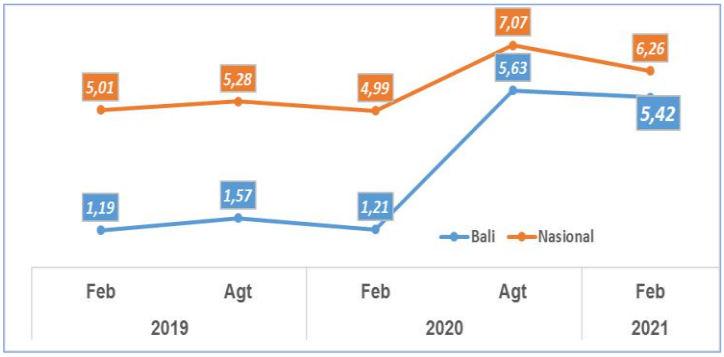

Sumber: BPS Provinsi Bali

kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 2.566,43 ribu orang, berkurang 1,49 ribu orang dibandingkan posisi Agustus 2020. Sejalan dengan berkurangnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga berkurang sebesar 0,61%. Dengan demikian, TPT tercatat sebesar 5,42%, turun 0,21% dibandingkan TPT Agustus 2020 yang tercatat sebesar 5,63%. Dilihat dari tingkat pendidikannya, TPT untuk Diploma I/II/III masih tertinggi diantara tingkat pendidikan lainnya, yaitu sebesar 11,18%.

Pada periode Agustus 2020-Februari 2021, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan serapan tenaga kerja, terutama ada pada Kategori G (Perdagangan) sebesar 1,60%; Kategori H (Transportasi dan pergudangan) sebesar 1,15%; Kategori A (Pertanian) sebesar 0,73%; dan Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) sebesar 0,59%. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan serapan utamanya ada pada Kategori C (Industri Pengolahan) sebesar -3,19% dan Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar -0,69%.

3. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTP/NTN digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan kesejahteraan petani/ nelayan atau kemampuan petani/nelayan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. NTP/NTN adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani/nelayan dengan indeks harga yang dibayar petani/nelayan. NTP/NTN di Provinsi Bali mengalami fluktuasi, terutama dalam masa pandemi Covid-19, dengan kecenderungan menurun. Dapat dilihat dalam Grafik di bawah ini, pada bulan Juni 2021 tercatat NTP sebesar 92,38, naik sebesar 0,49 dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 91,93. Di sisi lain, NTN juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya sebesar 99,24 di bulan Mei 2021 menjadi 100,95.

Grafik Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Provinsi Bali

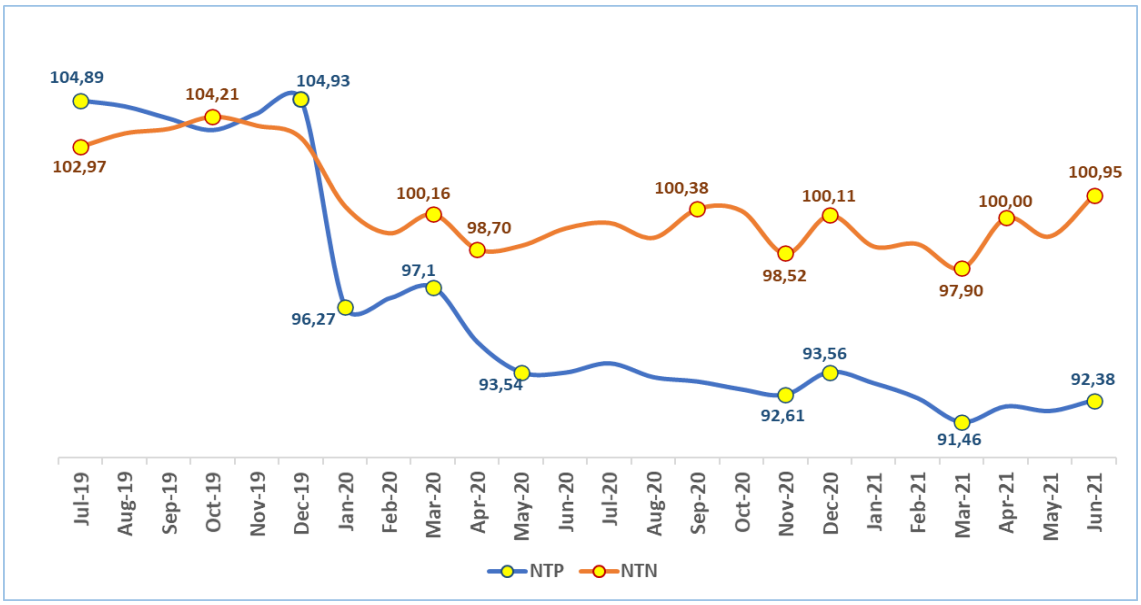

Sumber: BPS Provinsi Bali

Meskipun keduanya cenderung meningkat pada Triwulan II-2021, namun bila kita perhatikan grafik tersebut, tren penurunan pada NTP jauh lebih besar dibandingkan NTN, dengan selisih keduanya yang cukup signifikan pada posisi Juni 2021. Per Juni 2021, NTP berada pada angka 92,38, jauh di bawah NTN yang sebesar 100,95. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran petani lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya, yang berarti juga bahwa kesejahteraan petani masih belum cukup baik. Meskipun NTP dihasilkan dari beberapa subsektor (termasuk perikanan) dan terjadi penurunan khususnya pada subsektor holtikultura, akan tetapi setidaknya dapat dikatakan bahwa kesejahteraan para nelayan tampak lebih baik dibandingkan dengan petani pada umumnya. NTN sendiri pada bulan Juni 2021 sebesar 100,95, yang berarti nelayan mampu menerima lebih banyak dibandingkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) apabila ingin menjadikan sektor pertanian sebagai penopang sektor pariwisata. Langkah-langkah konkrit dan strategis perlu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan petani, diantaranya mengarahkan dan mendampingi petani untuk menanam dan menghasilkan produk yang lebih potensial, pemanfaatan lahan yang lebih optimal, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, serta mempermudah akses pemasaran produk pertanian yang dihasilkan.

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

2

HAnDAL

Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut *I-Account*. Dalam beberapa hal, isi dari *I-Account* sering disebut postur APBN.

Tabel I-Account APBN Tahun 2019, 2020 dan 2021 s.d. Triwulan II (dalam Miliar Rupiah)

URAIAN	Tw II-2019			Tw II-2020			Tw II-2021		
	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real
A. Pendapatan Negara	**13.634,96**	**6.393,59**	**46,9%**	**16.599,71**	**5.611,47**	**33,8%**	**11.959,34**	**4.706,76**	**39,4%**
I. Penerimaan Dalam Negeri	*13.631,41*	*6.393,27*	*46,9%*	*16.538,04*	*5.606,45*	*33,9%*	*11.920,42*	*4.694,00*	*39,4%*
1. Penerimaan Pajak	12.474,67	5.589,30	*44,8%*	14.822,40	4.593,18	*31,0%*	10.144,44	3.755,26	*37,0%*
2. PNBP	1.156,74	803,97	*69,5%*	1.715,64	1.013,27	*59,1%*	1.775,98	938,74	*52,9%*
II. Hibah	*3,55*	*0,32*	*9,0%*	*61,67*	*5,02*	*8,1%*	*38,92*	*12,76*	*32,8%*
B. Belanja Negara	**22.473,34**	**10.694,15**	**47,6%**	**21.042,19**	**10.450,58**	**49,7%**	**23.332,02**	**11.398,27**	**48,9%**
I. Belanja Pemerintah Pusat	*10.628,19*	*4.356,18*	*41,0%*	*9.920,19*	*3.916,86*	*39,5%*	*11.728,24*	*4.997,54*	*42,6%*
1. Belanja Pegawai	3.977,54	2.078,90	*52,3%*	4.450,33	2.028,30	*45,6%*	4.244,03	2.177,36	*51,3%*
2. Belanja Barang	4.091,24	1.679,77	*41,1%*	3.746,23	1.315,43	*35,1%*	4.401,29	1.681,09	*38,2%*
3. Belanja Modal	2.543,49	593,34	*23,3%*	1.706,61	566,24	*33,2%*	3.057,81	1.129,84	*36,9%*
4. Belanja Bantuan Sosial	15,92	4,17	*26,2%*	17,02	6,89	*40,5%*	25,12	9,26	*36,9%*
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Des	*11.845,15*	*6.337,97*	*53,5%*	*11.122,00*	*6.533,72*	*58,7%*	*11.603,78*	*6.400,73*	*55,2%*
1. Transfer Ke Daerah	11.214,96	5.959,86	*53,1%*	10.471,08	6.015,24	*57,4%*	10.924,66	5.924,72	*54,2%*
a. Dana Perimbangan	10.771,38	5.738,07	*53,3%*	9.903,70	5.609,50	*56,6%*	10.379,92	5.652,36	*54,5%*
1) Dana Alokasi Umum	7.400,03	4.314,31	*58,3%*	6.781,30	4.069,29	*60,0%*	6.647,76	3.905,25	*58,7%*
2) Dana Bagi Hasil	519,36	203,02	*39,1%*	481,08	217,54	*45,2%*	443,20	251,81	*56,8%*
3) DAK Fisik	679,83	60,13	*8,8%*	431,49	64,41	*14,9%*	958,41	86,77	*9,1%*
4) DAK Non Fisik	2.172,16	1.160,61	*53,4%*	2.106,68	1.258,26	*59,7%*	2.330,55	1.408,52	*60,4%*
5) Cadangan DAK Fisik	-	-	-	103,15	-	-	-	-	-
b. Dana Insentif Daerah	443,58	221,79	*50,0%*	567,38	405,74	*71,5%*	544,74	272,37	*50,0%*
c. Dana Keistimewaan DIY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Dana Transfer Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Dana Desa	630,19	378,11	*60,0%*	650,92	518,48	*79,7%*	679,12	476,00	*70,1%*
C Surplus (Defisit)	**(8.838,38)**	**(4.300,56)**	**48,7%**	**(4.442,48)**	**(4.839,11)**	**108,9%**	**(11.372,68)**	**(6.691,51)**	**58,8%**

Sumber: Aplikasi OM SPAN, Kanwil DJP Provinsi Bali dan Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT, diolah

Sebagaimana tersaji dalam Tabel *I-Account* di atas, postur APBN Tahun 2021 di wilayah Bali hingga akhir Triwulan II-2021 tercatat memiliki target pendapatan sebesar Rp11,96 triliun sedangkan Belanja Negara dialokasikan sebesar Rp23,33 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat pada masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dengan alokasi sebesar Rp11,73 triliun dan alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp11,60 triliun. Meskipun alokasi anggaran Belanja Negara di Provinsi Bali di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 10,9% dibandingkan tahun sebelumnya (2020), namun dengan komposisi anggaran pendapatan dan belanja tersebut, menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp11,37 triliun, jauh lebih besar dibandingkan defisit pada tahun 2020.

Dari sisi realisasi, Pendapatan Negara sampai dengan triwulan II-2021 terealisasi sebesar Rp4,71 triliun atau 39,4% dari target yang ditetapkan. Angka realisasi ini secara nominal lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan pada periode Triwulan II-2020 sebesar Rp5,61 triliun (33,8% dari target). Sedangkan Belanja Negara terealisasi sebesar Rp11,39 triliun atau 48,9% dari pagu Belanja Negara yang dialokasikan sebesar Rp23,33 triliun. Realisasi tersebut secara nominal mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Negara pada periode yang sama tahun 2020, namun secara persentasenya lebih rendah. Realisasi Belanja Negara pada Triwulan II-2020 sebesar Rp10,45 triliun atau 49,7% dari pagu sebesar Rp21,04 triliun. Pada Tahun 2021 ini alokasi Pendapatan Negara ditetapkan 27,9% lebih rendah dibandingkan tahun 2020, sedangkan Belanja Negara mengalami peningkatan sebesar 10,9%. Hal tersebut memperhatikan kondisi ekonomi yang masih relatif tidak menentu akibat pandemi Covid-19.

A. PENDAPATAN NEGARA

Pendapatan Negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Pendapatan Negara pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp11,96 triliun atau 27,9% lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp16,60 triliun. Penurunan target pendapatan yang paling signifikan terdapat pada Penerimaan Perpajakan yang mengalami penurunan hingga 31,6% di tahun 2021 ini.

1. Penerimaan Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat (atau pungutan kepada masyarakat) kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, tanpa adanya imbalan secara langsung. Penerimaan perpajakan terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional, yang secara total sampai dengan Triwulan II-2021 mencapai Rp3,755 triliun atau 37,0% dari target.

Tabel Penerimaan Perpajakan Tahun 2019, 2020, dan 2021 s.d. Triwulan II (dalam Miliar Rupiah)

No.	Jenis Pendapatan	Kelompok Akun	Triwulan II-2019			Triwulan II-2020			Triwulan II-2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Penghasilan	4111	3.377,06	3.873,78	114,7%	3.710,39	3.220,41	86,8%	3.103,76	2.487,81	80,2%
2	Pajak Pertambahan Nilai	4112	1.304,43	1.283,63	98,4%	1.134,12	1.050,86	92,7%	972,46	924,83	95,1%
3	Pajak Bumi dan Bangunan	4113	0,77	1,11	143,4%	1,14	1,53	133,9%	1,01	0,45	44,8%
4	BPHTB	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pajak Lainnya	4116	50,54	57,33	113,4%	49,00	49,11	100,2%	83,74	65,82	78,6%
6	Pajak Lain-Lain	4199	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			**4.732,80**	**5.215,85**	**110,2%**	**4.894,66**	**4.321,91**	**88,3%**	**4.160,98**	**3.478,92**	**83,6%**

Sumber: Kanwil DJP Provinsi Bali, diolah

Secara total, Penerimaan Pajak Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp3.478,92 miliar atau 83,6% dari target yang ditetapkan untuk periode s.d. Triwulan II-2021 sebesar Rp4.160,98 miliar. Sedangkan menurut jenisnya, masih didominasi jenis Pajak Penghasilan (PPh) dengan besaran realisasi sebesar Rp2.487,81 miliar atau 80,2% dari target yang ditetapkan untuk periode s.d. Triwulan II-2021 sebesar Rp3.103,76 miliar. Meskipun besaran target penerimaan PPh (s.d. Triwulan II-2021) ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, namun realisasi s.d. Triwulan II-2021 juga lebih rendah dibandingkan periode Triwulan II-2020. Persentase capaian realisasi penerimaan pajak tertinggi diperoleh dari jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan capaian sebesar Rp924,86 miliar atau 95,1% dari target yang ditetapkan untuk periode s.d. Triwulan II-2021 sebesar Rp972,46 miliar. Potensi ketercapaian PPN masih cukup tinggi, karena meskipun kondisi ekonomi belum cukup baik, namun aktivitas dari perdagangan besar dan eceran serta penyediaan akomodasi dan makan minum masih mendominasi aktivitas perekonomian.

Sedangkan untuk Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional, penerimaan masih didominasi Cukai dan Bea Masuk yang masing-masing tercapai sebesar 42,2% dan 40,8% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2021. Penerimaan Cukai tercatat terealisasi sebesar Rp277,72 miliar dari target sebesarRp658,79 miliar, sedangkan untuk Bea Masuk terealisasi sebesar Rp30,01 miliar dari target sebesar Rp73,60 miliar. Secara total, pendapatan dari Pajak Perdagangan Internasional sampai dengan Triwulan II-2021 tercapai sebesar Rp307,72 miliar dari target sebesar Rp732,38 miliar atau sebesar 42,0%.

Tabel Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2019, 2020, dan 2021 s.d. Triwulan II (dalam Miliar Rupiah)

No.	Jenis Pendapatan	Kelompok Akun	Triwulan II-2019			Triwulan II-2020			Triwulan II-2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Cukai	4115	746,80	337,20	45,2%	701,67	297,86	42,5%	658,79	277,72	42,2%
2	Bea Masuk	4121	155,53	69,96	45,0%	77,64	56,25	72,4%	73,60	30,01	40,8%
3	Bea Keluar	4122	-	0,02	N/A	-	0,01	N/A	N/A	0,00	N/A
Total			**902,33**	**407,18**	**45,1%**	**779,31**	**354,12**	**45,4%**	**732,38**	**307,72**	**42,0%**

Sumber: Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT, diolah

Selain itu, dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terdapat program pemberian insentif di bidang perpajakan maupun insentif kepabeanan dan cukai. Untuk realisasi pemanfaatan insentif perpajakan tahun 2020, sampai dengan akhir Triwulan II-2021 terealisasi sebesar Rp61,94 miliar, yang terdiri dari keringanan PPh Pasal 21 sebesar Rp33,2 miliar, pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp9,81 miliar, dan keringanan PPh Pasal 23 sebesar Rp18,93 miliar. Sedangkan untuk insentif kepabeanan dan cukai hingga akhir Triwulan II-2021 telah terealisasi Pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak

Dalam Rangka Impor (PDRI) atas impor barang dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp1.772,61 miliar.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara di luar penerimaan perpajakan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sejak tahun 2007, terdapat pos baru dalam PNBP yaitu pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). PNBP terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum dan PNBP lainnya. Secara total Realisasi PNBP pada Triwulan II-2021 yaitu Rp938,74 miliar atau 52,9% dari yang ditargetkan sebesar Rp1.775,98 miliar, dengan dominasi Pendapatan BLU sebesar RpRp757,04 miliar atau 80,6% dari total realisasi PNBP.

3. Pendapatan Hibah

Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah barang atau jasa, dan seluruh surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sampai dengan Triwulan II-2021 realisasi pendapatan negara dari hibah adalah sebesar Rp12,76 miliar atau 32,8% dari target sebesar Rp38,92 miliar.

B. BELANJA NEGARA

Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang diuraikan berikut ini.

1. Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga)

Belanja Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) pada tahun 2021 hingga akhir Triwulan II-2021 memiliki kinerja yang cukup baik. Realisasinya mencapai Rp4,99 triliun atau 42,5% dari pagu yang tersedia. Capaian tersebut melampaui target kinerja triwulan II yang secara kumulatif ditargetkan 40%. Selain itu, kinerja tersebut juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun

Grafik Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga s.d. Triwulan II-2021

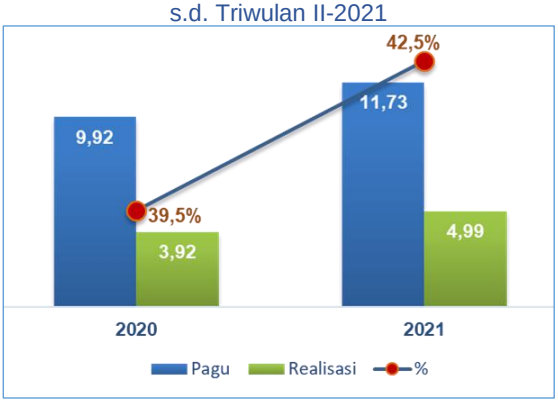

Sumber: Aplikasi OMSPAN,diolah

2020 yang tercapai sebesar 39,5% atau di bawah target. Lebih jauh lagi, peningkatan tersebut mencakup realisasi dari sisi nominal maupun persentase realisasinya terhadap pagu anggaran yang ditetapkan.

Meskipun secara total kinerja Belanja Pemerintah Pusat (Belanja K/L) cukup baik (realisasi 42,5%), namun apabila diperhatikan kinerja per jenis belanjanya (sebagaimana ditunjukkan pada Grafik Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja di bawah ini), hanya Belanja Pegawai saja yang memiliki kinerja melebihi target 40%. Yang perlu mendapatkan perhatian khususnya pada Belanja Barang dan Belanja Modal yang keduanya terealisasi 36,9%. Terlebih lagi apabila diperhatikan tren realisasi per bulan (non kumulatif), untuk Belanja Barang lambat diserap di awal tahun (Januari -Februari). Sedangkan untuk Belanja Modal, penyerapan yang cukup baik di bulan Januari kemudian mengalami penurunan di bulan-bulan berikutnya.

Grafik Tren Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Per Bulan Non Kumulatif s.d. Triwulan II-2021 (dalam Persen)

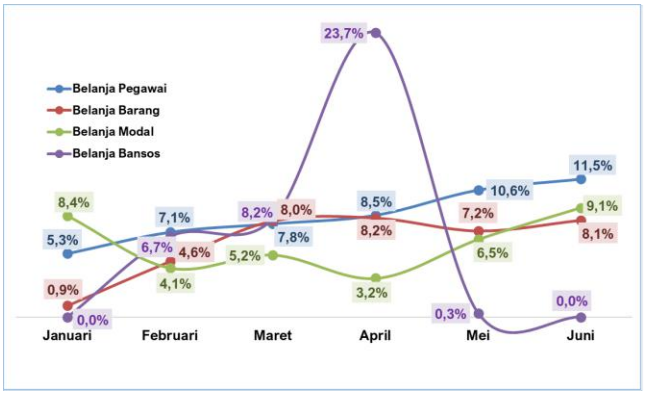

Sumber: Aplikasi OMSPAN,diolah

Grafik Tren Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Per Bulan Kumulatif s.d. Triwulan II-2021 (dalam Persen)

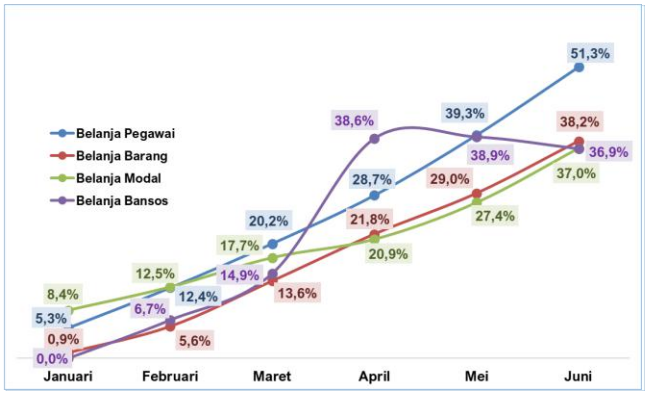

Sumber: Aplikasi OMSPAN,diolah

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Belanja Transfer Ke Daerah (TKDD) adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Alokasi TKDD untuk Provinsi Bali yang semula dialokasikan sebesar Rp11,85 Triliun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, telah mengalami perubahan menjadi sebesar Rp11,60 Triliun berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Meskipun berkurang, namun secara total pagu TKDD untuk 2021 adalah 5,6% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa s.d. Triwulan II 2020 dan 2021 (dalam Miliar Rupiah)

Dana Transfer	2020 (s.d Juni)			2021 (s.d Juni)			Δ Pagu (2021-2020)	Δ Realisasi (2021-2020)
	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real		
Dana Transfer ke Daerah	**10.335,52**	**6.014,45**	**58,2%**	**10.924,67**	**5.924,72**	**54,2%**	**5,7%**	**-1,5%**
Dana Perimbangan	**9.768,13**	**5.608,71**	**57,4%**	**10.379,93**	**5.652,35**	**54,5%**	**6,3%**	**0,8%**
Dana Transfer Umum	**7.229,95**	**4.264,22**	**59,0%**	**7.090,96**	**4.157,07**	**58,6%**	**-1,9%**	**-2,5%**
Dana Bagi Hasil	448,64	194,93	43,4%	443,20	251,81	56,8%	-1,2%	29,2%
DBH Pajak	*435,88*	*192,30*	*44,1%*	*433,04*	*243,85*	*56,3%*	*-0,7%*	*26,8%*
DBH SDA Perikanan	*12,76*	*2,63*	*20,6%*	*10,15*	*7,96*	*78,4%*	*-20,4%*	*202,7%*
Dana Alokasi Umum	6.781,31	4.069,29	60,0%	6.647,76	3.905,25	58,7%	-2,0%	-4,0%
Dana Transfer Khusus	**2.538,18**	**1.344,49**	**53,0%**	**3.288,97**	**1.495,29**	**45,5%**	**29,6%**	**11,2%**
DAK Fisik	431,49	64,42	14,9%	958,41	86,77	9,1%	122,1%	34,7%
DAK Non Fisik	2.106,69	1.280,07	60,8%	2.330,55	1.408,52	60,4%	10,6%	10,0%
Dana Insentif Daerah	**567,39**	**405,74**	**71,5%**	**544,74**	**272,37**	**50,0%**	**-4,0%**	**-32,9%**
Dana Desa	**650,92**	**518,49**	**79,7%**	**679,12**	**476,00**	**70,1%**	**4,3%**	**-8,2%**
TOTAL	**10.986,44**	**6.532,94**	**59,5%**	**11.603,79**	**6.400,72**	**55,2%**	**5,6%**	**-2,0%**

Sumber: Aplikasi Simtrada DJPK, diolah

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, secara total realisasi TKDD s.d. Triwulan II-2021 mencapai Rp6,4 Triliun atau sebesar 55,2% dari alokasi yang tersedia. Realisasi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi TKDD pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp6,5 Triliun atau 59,5% dari alokasinya. Porsi realisasi terbesar masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp3,9 Triliun dan DAK Non Fisik sebesar Rp1,4 Triliun. Keduanya berturut-turut berkontribusi sebesar 61,0% dan 22,0% dari total realisasi TKDD.

Realisasi terendah adalah pada DAK Fisik yang baru terealisasi sebesar Rp86,77 miliar atau 9,1% dari alokasi sebesar Rp958,41 miliar. Realisasi DAK Fisik pada tahun 2020 sangat terbantu oleh kebijakan relaksasi akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 ini, kebijakan relaksasi kembali diberikan melalui pemunduran batas waktu penyampaian data kontrak hingga akhir Agustus 2021. Meskipun demikian, hal ini perlu mendapat perhatian khusus dan monitoring yang baik. Apalagi, alokasi yang diberikan justru meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2020. Sedangkan untuk jenis TKDD yang memiliki kinerja paling baik adalah Dana Desa yang terealisasi 70,1% dari pagu. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, namun tetap berkinerja sangat baik.

3. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Saat ini terdapat tujuh entitas BLU di wilayah Provinsi Bali yang terdiri dari tiga BLU pada sektor kesehatan (RSUP Sanglah, RS Bhayangkara Denpasar, dan RS TNI Tk. II Udayana) dan empat BLU pada sektor pendidikan (Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, Poltrada Bali, dan Poltekkes Denpasar). Secara ringkas, kinerja keuangan BLU-BLU tersebut pada tahun 2020 dapat digambarkan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum di Provinsi Bali Tahun 2020

No.	Nama BLU	Kinerja Keuangan (Naik / Turun)					
		PNBP Layanan Utama	PNBP Non Layanan Utama	Jumlah PNBP	Belanja RM	Belanja PNBP	Jumlah Belanja
Sektor Kesehatan							
1)	RSUP Sanglah	naik	naik	naik	naik	naik	naik
2)	RSB Denpasar	naik	naik	naik	turun	naik	naik
3)	RST Udayana	naik	naik	naik	turun	naik	turun
Sektor Pendidikan							
4)	Univ. Udayana	turun	naik	naik	turun	turun	turun
5)	Undiksha	naik	naik	naik	turun	turun	turun
6)	Poltrada Bali	turun	turun	turun	turun	turun	turun
7)	Poltekkes Dps.	naik	turun	naik	turun	turun	turun

Sumber: Aplikasi Simtrada DJPK, diolah

Secara umum, BLU-BLU pada sektor kesehatan masih memiliki kinerja yang cukup baik di tengah kondisi pandemi. Hal ini dimungkinkan karena BLU-BLU tersebut masih memberikan pelayanan kepada masyarakat apalagi juga memberikan pelayanan dalam rangka penanganan Covid-19. Sedangkan untuk BLU di sektor pendidikan mengalami penurunan kinerja dengan tidak adanya kegiatan pembelajaran tatap muka, sehingga menurunkan pendapatan

Grafik Kontribusi PNBP BLU s.d. Triwulan II-2021
(dalam Persen)

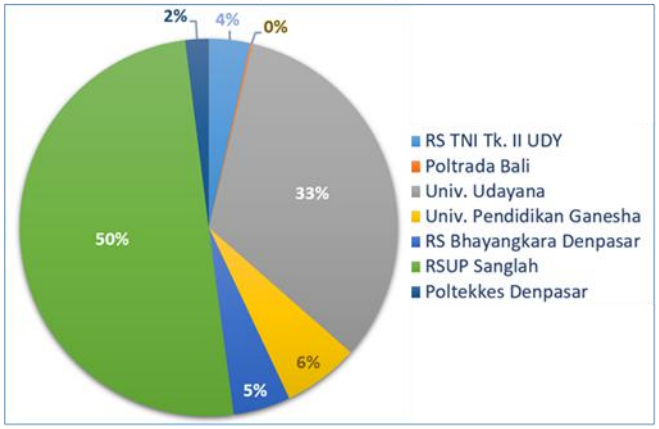

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Bali

BLU yang pada akhirnya menurunkan kinerja keuangannya. Dari sisi PNBP-nya, maka kontribusi PNBP paling besar diberikan oleh RSUP Sanglah dan Universitas Udayana dengan kontribusi masing-masing sebesar 50% dan 33%.

4. Manajemen investasi pusat

Aktivitas investasi Pemerintah Pusat di Provinsi Bali diantaranya dapat dilihat dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Penerusan Pinjaman kepada Pemda, BUMN/BUMD, dan/atau Koperasi.

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tabel Penyaluran KUR s.d. Triwulan II-2021 (dalam Juta Rupiah)

Skema	Jml Debitur	Penyaluran (Juta Rupiah)
Mikro	55.628	1.937.350
Kecil	5.853	1.374.039
TKI	-	-
UMI	623	2.709
SUPERMi	8.669	80.870
Total	**70.773**	**3.394.968**

Sumber: Aplikasi SIKP Kemenkeu, diolah

Sampai dengan 30 Juni Tahun 2021, penyaluran KUR di Provinsi Bali telah mencapai Rp3,39 triliun pada 70.773 debitur. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang sebesar Rp2,05 triliun pada 45.853 debitur. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro yang mencapai Rp1,94 triliun. Sedangkan menurut Kab/Kota, penyaluran tertinggi di Kota Denpasar dengan total Rp592,3 miliar dan Kab. Klungkung di peringkat terendah dengan total Rp189,8 miliar.

Grafik Penyaluran KUR Per Kab/Kota s.d. Triwulan II-2021 (dalam Miliar Rupiah)

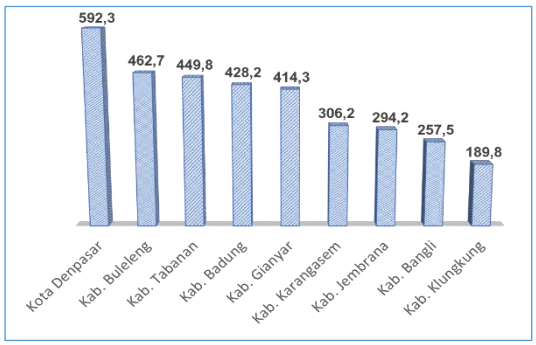

Sumber: Aplikasi SIKP Kemenkeu, diolah

Menurut sektor produksinya, maka sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang merupakan sektor non produksi masih mendominasi porsi penyaluran KUR dengan besaran 41,7%, sedangkan sektor produksi (selain Perdagangan Besar dan Eceran) penyalurannya sebesar 58,3%, masih di bawah target Pemerintah sebesar 60%. Sektor tersebut diantaranya Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan dengan porsi 20,7%, Industri Pengolahan sebesar 15,4% dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,4%.

Grafik Penyaluran KUR Per Sektor s.d. Triwulan II-2021 (dalam %)

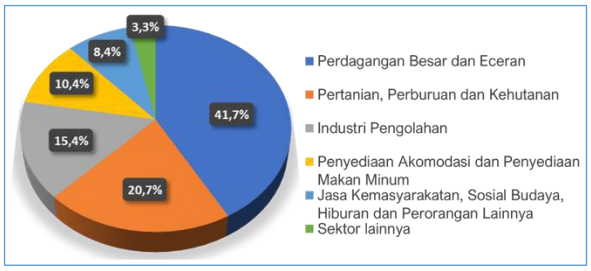

Sumber: Aplikasi SIKP Kemenkeu, diolah

b. Penerusan Pinjaman Daerah

Sejak Triwulan II-2020, seluruh Pemerintah Daerah (Kab. Tabanan dan Kab. Karangasem) telah menyelesaikan kewajibannya berkaitan dengan pelunasan atas penerusan pinjaman. Namun, rekonsiliasi pinjaman masih tetap dilakukan karena belum diterbitkan surat keterangan lunas (status masih aktif).

C. PROGNOSIS REALISASI APBN

Untuk menentukan prognosis realisasi APBN di Provinsi Bali, yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II-2021 mengalami perbaikan, tetapi masih berpotensi untuk kembali terkontraksi, apalagi dengan kebijakan PPKM yang berlangsung cukup lama. Namun, melihat kondisi saat ini, masih cukup optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan positif.
2. Belum jelasnya rencana pembukaan kembali pariwisata untuk wisatawan internasional, sehingga dapat menimbulkan tantangan tersendiri untuk realisasi penerimaan negara dari sektor yang berkaitan dengan pariwisata, khususnya dari Perpajakan. Namun, diperkirakan penerimaan perpajakan diperkirakan tidak akan berada jauh di bawah tahun 2020, apalagi dengan target pendapatan yang jauh lebih rendah dari tahun 2020.
3. Sedangkan untuk Belanja Negara akan terus didorong untuk menggerakkan ekonomi, proyek-proyek prioritas nasional terus dilanjutkan, dan realisasi TKDD diperkirakan juga akan tetap tinggi seperti tahun sebelumnya.

Dengan menggunakan analisis *trend* dan mempertimbangkan asumsi-asumsi tersebut di atas, maka diperkirakan capaian realisasi pendapatan negara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 mencapai Rp10.911,04 triliun atau sekitar 91,5%. Untuk belanja negara dengan kebijakan penyelamatan ekonomi nasional, pemenuhan belanja wajib, perlindungan sosial, melanjutkan pemenuhan infrastruktur (khususnya proyek-proyek nasional) serta realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2021, diperkirakan realisasi belanja negara sampai akhir tahun 2021 mencapai Rp22,56 triliun atau 96,7%.

Tabel Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Bali s.d. Triwulan IV Tahun 2021

Uraian	Pagu (Miliar Rupiah)	Realisasi s.d. Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp Miliar	% Realisasi	Rp Miliar	% Realisasi
Pendapatan Negara	11.924,63	4.453,13	37,3%	10.911,04	91,5%
Belanja Negara	23.332,02	11.398,27	48,9%	22.562,06	96,7%
Surplus/Defisit	(11.407,39)	(6.945,14)		(11.651,02)	

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

3

HAnDAL

Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

APBD diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan, menekan pengangguran, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pada kondisi Pandemi ini, dana APBD digunakan untuk keperluan kesehatan serta pemulihan kondisi perekonomian daerah yang terdampak.

Tabel Realisasi APBD Lingkup Provinsi Bali
s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2020 dan Tahun 2021 (*miliar rupiah*)

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN	**24.513,04**	**10.742,89**	**22.681,98**	**8.467,54**
PAD	**10.999,37**	**4.397,49**	**9.037,76**	**2.090,62**
Pajak Daerah	8.611,76	3.074,86	6.620,92	985,01
Retribusi Daerah	412,97	139,25	333,14	102,21
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	491,22	516,69	444,16	473,78
Lain-Lain PAD yang Sah	1.483,43	666,69	1.639,54	529,62
Pendapatan Transfer	**12.818,39**	**6.155,56**	**13.117,54**	**6.247,05**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	10.316,62	5.025,74	11.576,51	5.809,02
Dana Bagi Hasil Pajak	467,40	173,12	4.308,81	2.335,96
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	5,84	2,32	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	7.070,39	4.069,29	7.117,90	3.422,56
Dana Alokasi Khusus	2,772.99	781.00	149,81	50,50
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	959,66	672,41	892,23	290,66
Dana Otonomi Khusus	-	-	85,29	47,69
Dana Penyesuaian	959,66	672,41	806,94	242,98
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi	1097,21	378,24	360,05	100,12
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	896	308,48	317,45	79,51
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	201,21	69,77	42,60	20,61
Transfer Bantuan Keuangan	444,91	79,16	288,75	47,25
Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	444,91	79,16	288,75	47,25
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	**695,27**	**189,84**	**526,68**	**129,87**
Pendapatan Hibah	475,66	66,87	295,05	85,58
Pendapatan Dana Darurat	-	-	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	219,61	122,97	231,63	44,29
JUMLAH PENDAPATAN	**24.513,04**	**10.742,89**	**22.681,98**	**8.467,54**
BELANJA	**22.704,23**	**7.441,21**	**21.059,47**	**6.953,22**
Belanja Pegawai	9.075,97	3.860,04	7.279,78	3.670,88
Belanja Barang	7.261,97	2.470,51	7.254,65	1.991,80
Belanja Bunga	8,6	2,81	20,01	4,13
Belanja Subsidi	11,44	-	5,16	5,00
Belanja Hibah	1.623,53	241,11	1.776,49	617,08
Belanja Bantuan Sosial	445,29	57,92	126,88	9,30
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0,00	0,00
Belanja Modal	3.506,53	491,32	4.412,33	413,17
Belanja Tidak Terduga	771,01	317,49	184,17	241,86
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	**4.064,68**	**1,590,16**	**3.426,30**	**1.052,88**
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	1794,52	568,55	1.858,66	411,99
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	84,8	19,53	1.670,52	353,41
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1709,73	549,02	188,14	58,59
Transfer Bantuan Keuangan	2.270,16	1021,61	1.567,64	640,89
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	885,84	265,39	760,40	299,48
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.268,40	679,23	567,03	296,43
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	115,92	76,99	240,21	44,99
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**26.768,91**	**9.031,37**	**24.485,78**	**8.006,10**
SURPLUS/ DEFISIT	**-2.255,87**	**1.711,52**	**-1.803,80**	**461,45**

Sumber: LRA Pemerintah Daerah triwulan II 2021 (diolah)

Grafik Realisasi APBD Provinsi Bali s.d. Triwulan II Tahun 2019, 2020, dan 2021 *(triliun rupiah)*

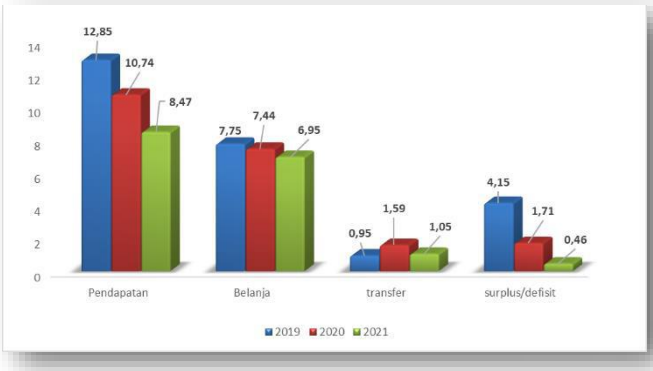

Sumber: LRA Pemerintah Daerah triwulan II 2021 (diolah)

Realisasi pendapatan seluruh Pemda di Bali sampai dengan Triwulan II tahun 2021 mencapai Rp8,47 triliun atau 37,33% dari target yang ditetapkan, turun 21,18% dibandingkan pendapatan periode yang sama tahun 2020.

Sedangkan realisasi Belanja dan Transfer terealisasi sebesar Rp8 triliun atau 32,7% dari pagu dimana secara kinerja menurun 1 % dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 33,7%. Secara total, sampai dengan triwulan II tahun 2021, anggaran pemerintah daerah di Bali mengalami surplus sebesar Rp461 miliar.

A. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah s.d. Triwulan II 2021 sebesar Rp8,47 triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2,09 triliun dengan kontribusi 24,7% terhadap total pendapatan, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp6,25 triliun dengan kontribusi 73,8%, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp129,87 miliar dengan kontribusi sebesar 1,5%. Adapun rincian Pendapatan Pemda se-Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Grafik Realisasi PAD Provinsi Bali s.d. Triwulan II Tahun 2020, dan 2021 (*triliun rupiah*)

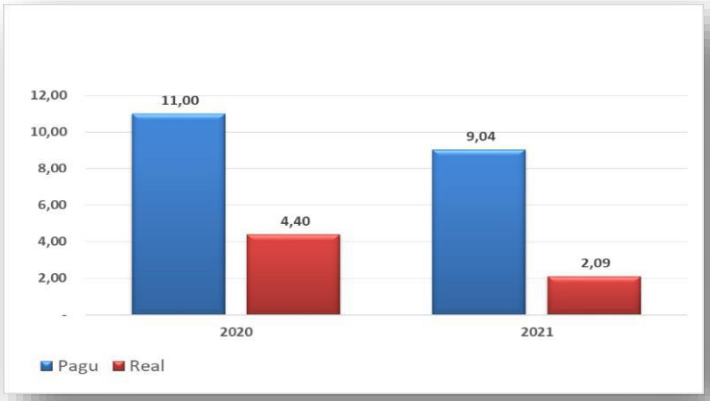

Sumber: LRA Pemerintah Daerah triwulan II 2021 (diolah)

Realisasi PAD s.d. Triwulan II 2021 sebesar Rp2,09 triliun, 52,46% lebih rendah bila dibandingkan triwulan II 2020. PAD didominasi oleh Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp985,01 miliar atau 47,1% dari Total realisasi PAD, diikuti Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp529,62 miliar (25,3% dari total realisasi PAD). Realisasi tertinggi berasal dari Kabupaten Badung dengan kontribusi sebesar Rp721,8 miliar (34,5% dari total realisasi PAD), sedangkan

kontribusi terendah adalah Kab. Bangli sebesar Rp20,4 miliar (1,0% dari total realisasi PAD).

Perkembangan penerimaan daerah pembentuk struktur PAD di Provinsi Bali sampai dengan Triwulan II 2021 adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Pajak Daerah

Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Per Pemda Lingkup Provinsi Bali s.d. Triwulan II Tahun 2021 *(miliar rupiah)*

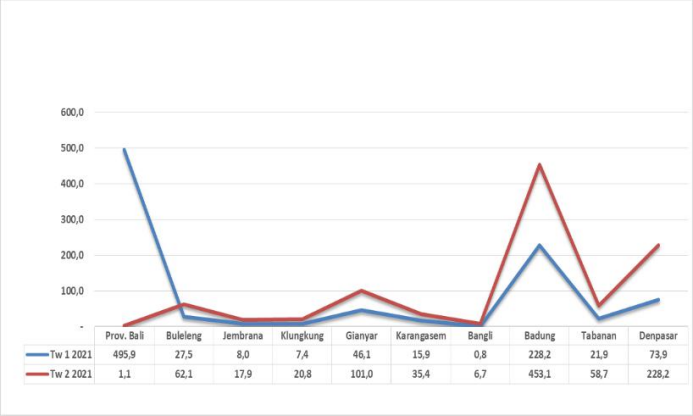

Sumber: LRA Pemerintah Daerah triwulan II 2021 (diolah)

Total Penerimaan Pajak Daerah se-Provinsi Bali s.d. Triwulan II-2021 adalah Rp985 miliar. Kontribusi terbesar diberikan Pemda Kabupaten Badung dengan capaian Rp453 miliar atau 46% dari total Penerimaan Pajak Daerah, diikuti Kota Denpasar sebesar Rp228 miliar (23,17%), dan Kabupaten Gianyar sebesar Rp101 miliar (10,26%). Penerimaan Pajak Daerah dalam masa pandemi Covid-19 secara total tumbuh dengan rata-rata sebesar 6,43% dibandingkan periode triwulan I tahun 2021. Namun, secara persentase Pemerintah Provinsi Bali mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar -99.8% yang berbanding terbalik dengan Kabupaten Bangli yang naik 769% dibandingkan periode triwulan I tahun 2021.

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Total Penerimaan Retribusi Daerah se-Provinsi Bali s.d. Triwulan II 2021 mencapai Rp102,21 miliar, yang bersumber dari Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Kontributor terbesar adalah Kab. Buleleng sebesar Rp13,72 miliar (13,43%) dan Kota Denpasar sebesar Rp13,60

Grafik Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Per Pemda Lingkup Provinsi Bali s.d. Triwulan II Tahun 2021 (*miliar rupiah*)

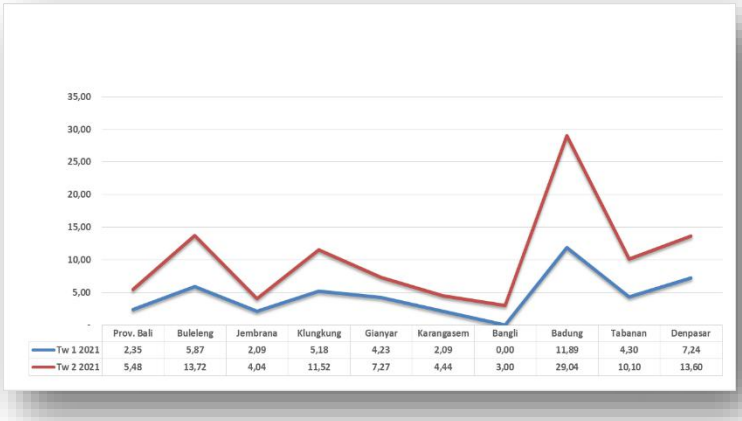

Sumber: LRA Pemerintah Daerah triwulan II 2021 (diolah)

miliar (13,30%). Penerimaan Retribusi Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 126 %, dengan persentase pertumbuhan tertinggi ada pada Kab. Bangli.

c) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Grafik Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Per Pemda di Provinsi Bali s.d. Triwulan II 2021 (*miliar rupiah*)

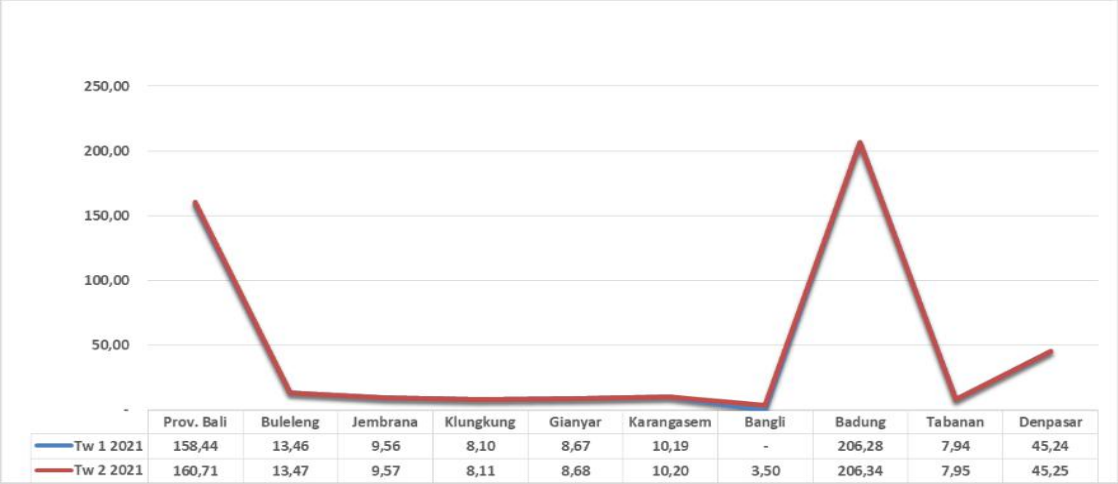

	Prov. Bali	Buleleng	Jembrana	Klungkung	Gianyar	Karangasem	Bangli	Badung	Tabanan	Denpasar
Tw 1 2021	158,44	13,46	9,56	8,10	8,67	10,19	-	206,28	7,94	45,24
Tw 2 2021	160,71	13,47	9,57	8,11	8,68	10,20	3,50	206,34	7,95	45,25

Sumber: LRA Pemerintah Daerah triwulan II 2021 (diolah)

Penerimaan ini berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta dan Lembaga Keuangan Non Bank daerah/ BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta dan Lembaga Keuangan Non Bank (BUKP). Penerimaan ini relatif tidak jauh berbeda dengan periode triwulan I tahun 2021, dimana penerimaan terbesar diperoleh Kab. Badung sebesar Rp206,34 miliar atau 43,55% dari total penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, diikuti Provinsi Bali sebesar Rp160,71 miliar atau 33,92%.

d) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPAD)

Grafik Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Per Pemda di Provinsi Bali s.d. Triwulan II 2021 (*miliar rupiah*)

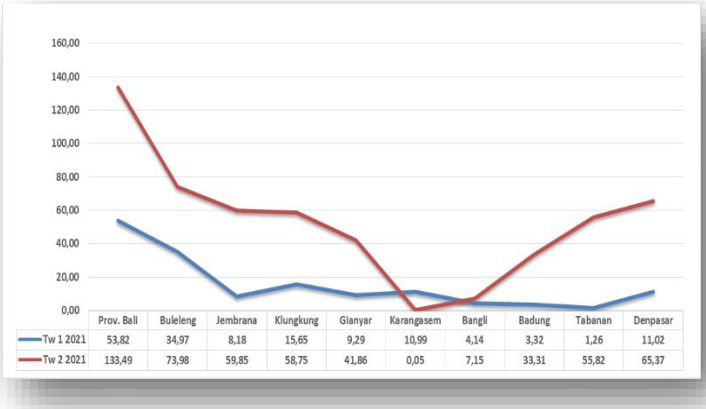

	Prov. Bali	Buleleng	Jembrana	Klungkung	Gianyar	Karangasem	Bangli	Badung	Tabanan	Denpasar
Tw 1 2021	53,82	34,97	8,18	15,65	9,29	10,99	4,14	3,32	1,26	11,02
Tw 2 2021	133,49	73,98	59,85	58,75	41,86	0,05	7,15	33,31	55,82	65,37

Sumber: LRA Pemerintah Daerah triwulan II 2021 (diolah)

LLPAD antara lain berasal dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, dan pendapatan BLUD. Penerimaan terbesar berasal dari Provinsi Bali sebesar Rp133,49 miliar atau 25,2% dari total LLPAD, disusul Kabupaten Buleleng

sebesar Rp73,98 miliar atau 13,97%. Total LLPAD seluruh Pemda hingga Triwulan II 2021 adalah sebesar Rp529,62 miliar.

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan transfer seluruh Pemda di Bali pada Triwulan II Tahun 2021 mencapai Rp6,25 triliun atau meningkat sebesar 164,55% dibandingkan triwulan I 2021. Pendapatan transfer didominasi Transfer Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan sebesar Rp5,81 triliun atau 92,99% dari total transfer. Selanjutnya, transfer dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp290,66 miliar (4,65%), transfer Pemda lainnya sebesar Rp100,12 miliar (1,6%) dan transfer bantuan keuangan sebesar 47,25 miliar (0,76%).

Grafik Realisasi Penerimaan Transfer Per Pemda di Provinsi Bali s.d. Triwulan II 2021 (*miliar rupiah*)

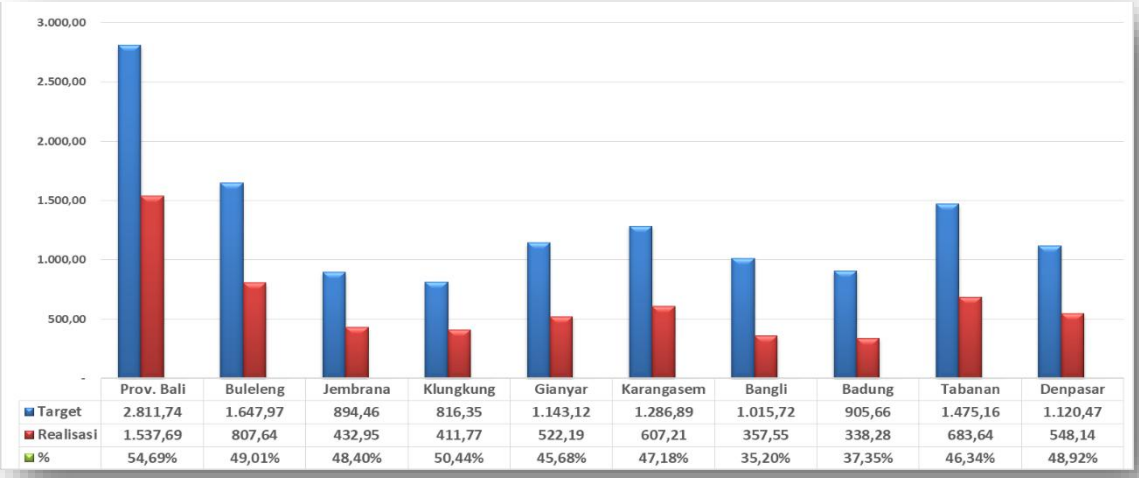

	Prov. Bali	Buleleng	Jembrana	Klungkung	Gianyar	Karangasem	Bangli	Badung	Tabanan	Denpasar
Target	2.811,74	1.647,97	894,46	816,35	1.143,12	1.286,89	1.015,72	905,66	1.475,16	1.120,47
Realisasi	1.537,69	807,64	432,95	411,77	522,19	607,21	357,55	338,28	683,64	548,14
%	54,69%	49,01%	48,40%	50,44%	45,68%	47,18%	35,20%	37,35%	46,34%	48,92%

Sumber: LRA Pemerintah Daerah triwulan II 2021 (diolah)

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Grafik Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Per Pemda di Provinsi Bali s.d. Triwulan II 2021 (*miliar rupiah*)

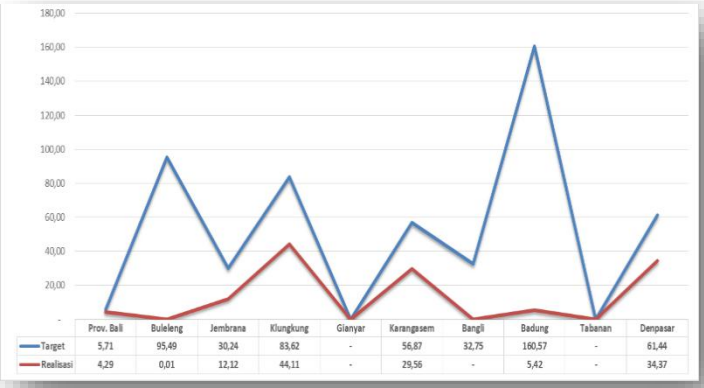

	Prov. Bali	Buleleng	Jembrana	Klungkung	Gianyar	Karangasem	Bangli	Badung	Tabanan	Denpasar
Target	5,71	95,49	30,24	83,62	-	56,87	32,75	160,57	-	61,44
Realisasi	4,29	0,01	12,12	44,11	-	29,56	-	5,42	-	34,37

Sumber: LRA Pemerintah Daerah triwulan II 2021 (diolah)

Pagu Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp526,68 miliar s.d. Triwulan II terealisasi Rp129,87 miliar (24,66%). Penyumbang terbesarnya adalah Kabupaten Klungkung dengan realisasi sebesar Rp44,1 miliar.

B. BELANJA DAERAH

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Grafik Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal di Provinsi Bali s.d. Triwulan II 2021 (*miliar rupiah*)

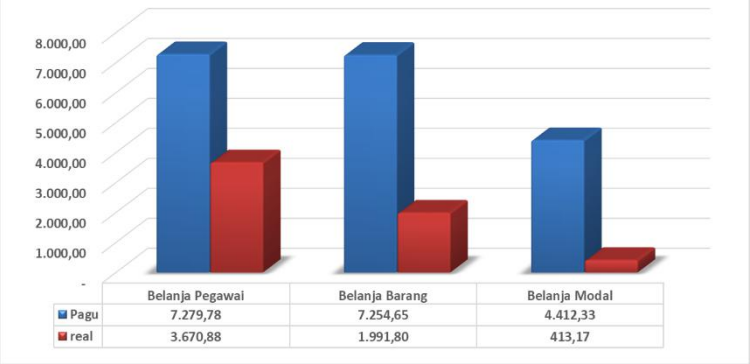

Sumber: LRA Pemerintah Daerah triwulan II 2021 (diolah)

Dari sisi penyerapan, s.d. Triwulan II Tahun 2021, realisasi belanja mencapai Rp6,95 triliun atau 33,02% dari pagu, lebih rendah secara nominal jika dibandingkan Triwulan II Tahun 2020 yang terealisasi sebesar 7,44 triliun (32,77%). Belanja pegawai memiliki realisasi terbesar, mencapai Rp3,67 triliun atau 52,79% dari total belanja, 4,9% lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan II 2020. Belanja pegawai tumbuh 193,06% dari triwulan sebelumnya, terutama karena pembayaran gaji ke-13 dan THR. Belanja Barang dan Belanja Modal juga meningkat, namun masih relatif rendah. Keduanya berturut-turut mencapai 28,65% dan 5,94% jika dibandingkan dari pagunya. Sementara itu, Belanja Tidak Terduga mencapai Rp241,86 miliar, Belanja Bantuan Sosial Rp6,30 miliar, Belanja Hibah Rp617 miliar, dan Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp4,13 miliar, dimana hal ini erat kaitannya dengan kondisi penanggulangan Covid-19.

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Grafik Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan di Provinsi Bali s.d. Triwulan II 2021 (*miliar rupiah*)

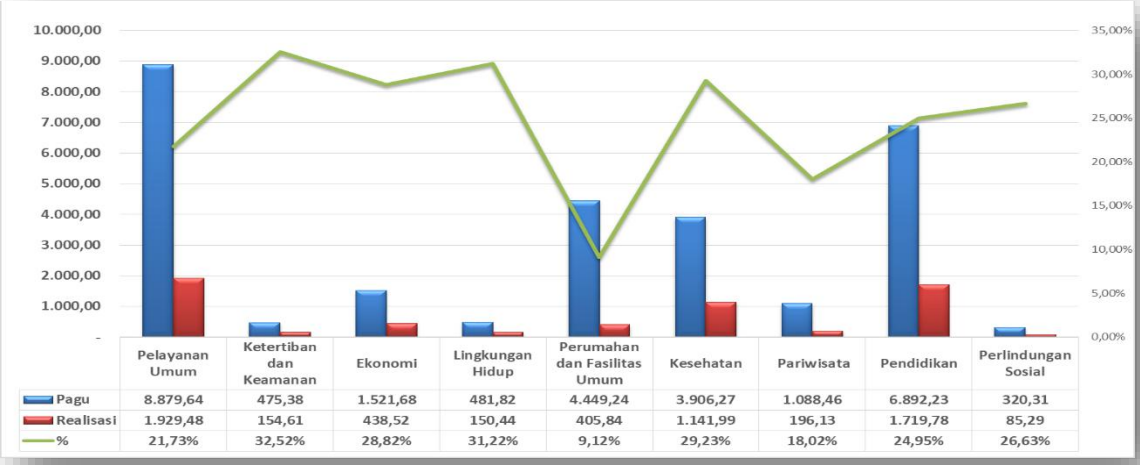

Sumber: LRA Pemerintah Daerah triwulan II 2021 (diolah)

Belanja Pelayanan Umum memberikan kontribusi tertinggi dengan besaran realisasi 31,01% dari total realisasi belanja menurut urusan, diikuti dengan Urusan Pendidikan (27,64%), serta Belanja Urusan Kesehatan (18,35%). Sedangkan untuk alokasi belanja di bidang kesehatan, sesuai amanat UU No 36/2009 tentang Kesehatan, seluruh Kabupaten/Kota telah memenuhi alokasi minimal 10%.

C. PROGNOSIS REALISASI APBD SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2021

Dampak pandemi Covid-19 dirasakan lebih dalam oleh Pemerintah Daerah di Bali yang tercermin dalam realisasi APBD-nya. Hal ini karena mayoritas Pemerintah Daerah di Bali memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pariwisata. Pada APBD se-Provinsi Bali Tahun 2021, target Total Pendapatan Daerah sebesar Rp22,68 triliun bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi pendapatan s.d. Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp8,47 triliun. Realisasi ini Rp2,28 triliun atau 21,25% lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah pada Triwulan II Tahun 2020. Meskipun demikian, realisasi pendapatan tersebut tumbuh cukup baik di tengah kondisi Covid-19, yaitu sebesar Rp4,51 triliun atau naik sebesar 114,18% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah pada Triwulan I Tahun 2020. Peningkatan pendapatan daerah terutama didorong oleh realisasi pendapatan dari komponen Pajak Daerah, terutama dari Pajak Hotel dan Restoran.

Dengan asumsi dan pertimbangan yang serupa dalam pembahasan prognosis Realisasi APBN sampai dengan akhir tahun 2021, serta dengan menggunakan analisis tren, maka pendapatan daerah diperkirakan akan terealisasi cukup baik, di kisaran 91,2% atau mendekati capaian akhir tahun 2020. Hal ini didorong dengan harapan bahwa proses vaksinasi di Bali berjalan dengan relatif baik sehingga pariwisata internasional dapat dibuka kembali. Di sisi lain, Belanja Daerah yang pada tahun 2020 tidak terlalu optimal diharapkan dapat terealisasi dengan lebih baik. Hal ini didorong dengan masih terus berjalannya proyek-proyek besar atau prioritas nasional. Realisasi belanja daerah diperkirakan berada di kisaran 87,3%.

Tabel Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Bali s.d. Triwulan IV Tahun 2021

Uraian	Pagu (Miliar Rupiah)	Realisasi s.d. Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp Miliar	% Realisasi	Rp Miliar	% Realisasi
Pendapatan Daerah	22.681,98	8.467,54	37,3%	20.685,96	91,2%
Belanja Daerah	21.059,47	6.953,22	33,0%	18.384,92	87,3%
Surplus/Defisit	(1.803,80)	461,45		2.301,04	

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

4

HAnDAL

Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian
Tingkat Wilayah Prov. Bali s.d. Triwulan II Tahun 2020 dan Tahun 2021 (*miliar rupiah*)

Uraian	Triwulan II - 2021					Triwulan II -2020
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan / Penurunan		Konsolidasi
Pendapatan Negara	4.453,13	2.066,82	6.519,95	(3.696,20)	-36,18%	10.216,15
Pendapatan Perpajakan	3.755,26	985,01	4.740,27	(2.927,77)	-38,18%	7.668,04
Pendapatan Bukan Pajak	695,86	1.149,91	1.845,77	(490,14)	-20,98%	2.335,91
Hibah	2,01	85,58	87,59	15,70	21,83%	71,89
Transfer	-	6.247,05	(153,67)	(293,99)	-86,01%	140,32
Belanja Negara	4.997,54	8.006,10	13.003,64	(49,01)	-0,38%	13.052,65
Belanja Pemerintah	4.997,54	6.953,22	11.950,76	(151,12)	-1,25%	12.101,88
Transfer	6.400,72	1.052,88	1.052,88	(537,28)	-33,79%	1.590,16
Surplus/(Defisit)	(544,42)	(5.939,28)	(6.483,69)	(3.007,80)	86,53%	(3.475,89)
Pembiayaan	-	796,47	796,47	(611,97)	-43,45%	1.408,44
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	873,39	873,39	(579,65)	-39,89%	1.453,04
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	76,92	76,92	32,32	72,46%	44,60
SILPA/(SIKPA)	(544,42)	(5.142,80)	(5.687,22)	(3.619,77)	175,08%	(2.067,45)

Sumber: LRA Pemda Triwulan II tahun 2021, Om Span, dan KFR triwulan II tahun 2020
catatan: Transfer pemerintah pusat s.d Triwulan II 2021 dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah

Pendapatan Konsolidasian triwulan II tahun 2021 sebesar Rp6,52 triliun, lebih rendah 36.18% dari periode Triwulan II Tahun 2020. Secara nominal, hampir seluruh pendapatan mengalami penurunan, kecuali pendapatan hibah. Pendapatan perpajakan tercatat turun sebesar Rp2,93 triliun (-38,18%). Pendapatan Bukan Pajak juga mengalami penurunan sebesar Rp190,14 miliar (-20,98%), Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp15,70 miliar (21,83%), sedangkan Transfer turun sebesar Rp293,99 miliar (-86,01%).

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Pemerintahan Umum (*General Government Revenue*) atau Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pendapatan Perpajakan Konsolidasi Triwulan II Tahun 2021 masih mendominasi dengan kontribusi sebesar Rp4,74 triliun atau 72,70% dari total pendapatan konsolidasian.

Grafik Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Prov. Bali s.d. Triwulan II Tahun 2021 dan 2020 (*miliar rupiah*)

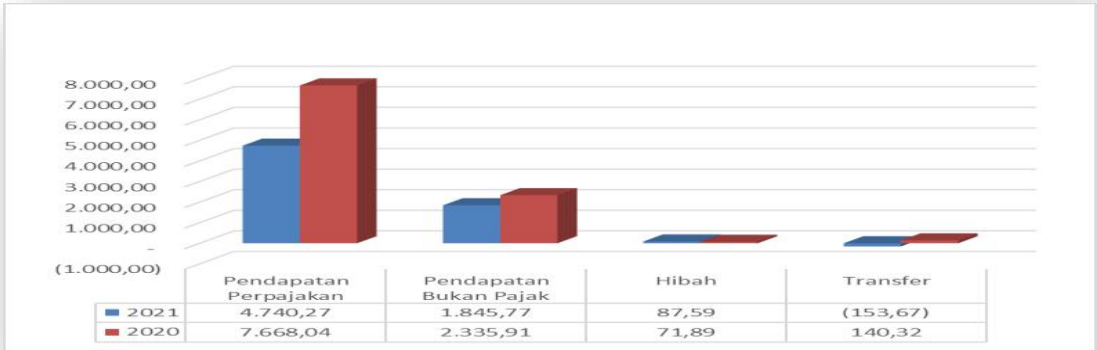

Sumber: Om Span, LRA Pemda Triwulan II tahun 2020 dan 2021 (diolah)

Pendapatan Bukan Pajak memberi kontribusi sebesar Rp1,84 triliun atau 28,31%. Semua jenis Pendapatan Negara mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pendapatan konsolidasian periode yang sama tahun 2020. Hal ini masih disebabkan oleh dampak dari pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Untuk periode sampai dengan triwulan II tahun 2021 ini, Pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kontribusi sangat berbeda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Bali, dimana Pendapatan Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp4,45 triliun, memberi kontribusi sebesar 68,30%. Sedangkan Pendapatan Pemerintah Daerah tercatat sebesar Rp2,07 triliun memberi kontribusi sebesar 31,70%. Pada Grafik Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah, tercatat Pendapatan Bukan Pajak dan Hibah yang didominasi oleh Pendapatan Pemerintah Daerah, sedangkan Pendapatan Perpajakan didominasi oleh Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukan adanya penurunan kinerja pada Pemerintah Daerah terutama dalam sektor-sektor usaha yang merupakan penghasil Pajak Daerah.

Grafik Perbandingan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Pendapatan Konsolidasian Prov. Bali s.d. Triwulan II Tahun 2021 (*miliar rupiah*)

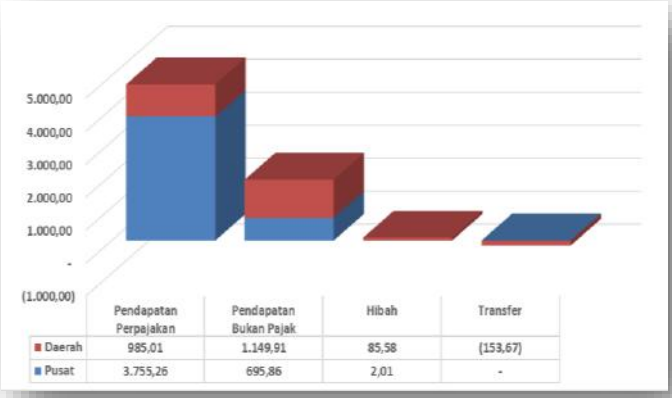

Sumber: Om Span, LRA Pemda Triwulan II tahun 2021 (diolah)
Catatan: Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat sampai dengan Triwulan II 2021 dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah

2. Analisis Perubahan

Pendapatan Konsolidasian sampai dengan Triwulan II tahun 2021 tercatat sebesar Rp6,52 triliun, 36,18% lebih rendah dibanding periode Triwulan II tahun 2020 yang dipengaruhi oleh penurunan pendapatan perpajakan, bukan pajak, dan transfer. Penurunan ini terjadi seiring dengan kontraksi atau pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19, dengan pembatasan akses laut dan udara ke Bali serta penutupan sementara hampir seluruh tempat wisata sejak April 2020.

Grafik Perubahan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Prov. Bali s.d.Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 (miliar rupiah)

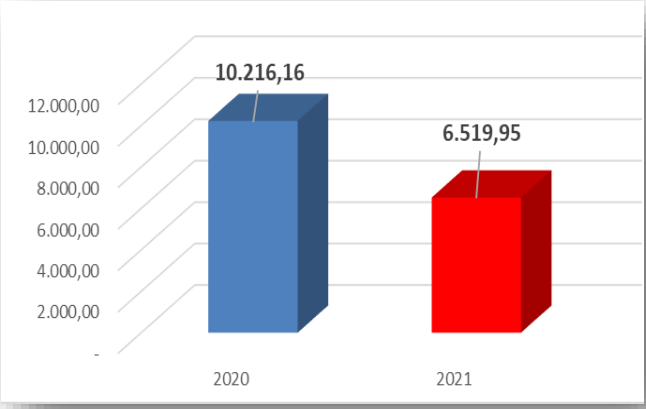

Sumber: Om Span, LRA Pemda Triwulan II tahun 2021 (diolah)

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Pendapatan Konsolidasian

Tabel Realisasi Pendapatan Konsolidasian Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2020 dan 2021 (triliun rupiah)

Uraian	Triwulan II - 2020		Triwulan II - 2021	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
Pendapatan Perpajakan	7,67	-20,83%	4,74	-38,18%
Pendapatan Bukan Pajak	2,33	-1,89%	1,85	-20,98%
Total	10,01	-0,23%	6,59	-34,21%
PDRB ADHB / Pert. Ekonomi	54,43	-7,22%	56,41	3,64%

Sumber: Om Span, LRA Kanwil DJPB Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2020, KFR 2020 , BPS Provinsi Bali (diolah)

Ekonomi Bali tumbuh positif sebesar 3,64%, berbanding terbalik dengan pendapatan pemerintah yang turun sebesar 34,21%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya tergantung dengan realisasi pendapatan konsolidasian pemerintah.

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Porsi terbesar Belanja Konsolidasian tercatat pada Belanja Pegawai sebesar Rp5,85 triliun, diikuti oleh Belanja Barang sebesar Rp3,67 triliun. Hal ini mengindikasikan belanja operasional masih mendominasi di wilayah Provinsi Bali. Tingginya belanja pegawai pada Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh jumlah pegawainya. Untuk dapat menekan belanja pegawai, pemerintah daerah perlu melakukan analisis beban kerja serta pemanfaatan teknologi informasi melalui upaya digitalisasi organisasi.

Dilihat dari proporsi belanja, tercatat secara agregat belanja konsolidasian lebih didominasi oleh belanja pemerintah daerah, yakni sebesar Rp6,95 triliun (58,16%), sedangkan pemerintah pusat sebesar Rp4,99 triliun (41,84 %). Apabila dikaitkan dengan kontribusi belanja terhadap pertumbuhan ekonomi, nampak bahwa kontribusi Pemerintah Daerah lebih besar daripada Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan penajaman atas kualitas belanja dengan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagaimana yang digunakan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan *multiplier effect* ekonomi Bali.

Grafik Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian Prov. Bali s.d. Triwulan II Tahun 2021 (miliar rupiah)

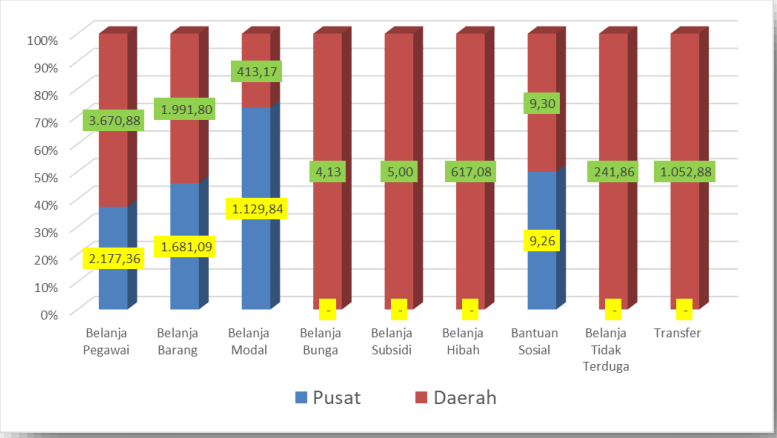

Sumber: Om Span, LRA Pemda Triwulan II tahun 2021 (diolah)

2. Analisis Perubahan

Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasian secara agregat mengalami penurunan sebesar Rp49,01 miliar (0,38%). Dilihat dari penurunannya, belanja Transfer tercatat mengalami penurunan tertinggi, yaitu Rp537,28 miliar (33,79%), diikuti Belanja Pemerintah sebesar Rp151,12 (1,25%). Hal penting lainnya dengan belanja bantuan sosial bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah memastikan keakuratan data penerima bantuan dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi.

Grafik Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasian Prov. Bali s.d. Triwulan II Tahun 2021 dan 2020 (miliar rupiah)

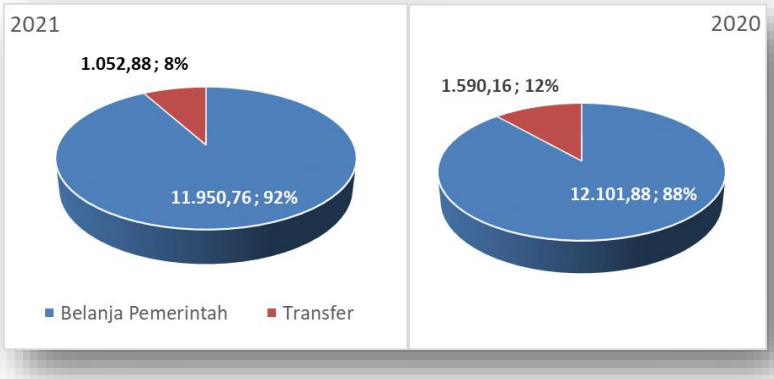

Sumber: LRA Pemda dan KFR 2020 Triwulan II tahun 2021, Om Span (diolah)

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional

Penurunan Belanja Pemerintah tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Bali. Peningkatan PDRB Bali pada Triwulan II 2021 lebih dipengaruhi oleh kontribusi berbagai aktivitas ekonomi dari berbagai lapangan usaha, utamanya Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sedangkan korelasi antara Belanja Pemerintah dengan tingkat kemiskinan adalah negatif, yang berarti belanja yang menurun akan meningkatkan tingkat kemiskinan, atau sebaliknya, peningkatan Belanja Pemerintah akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Tabel Rasio Realisasi Belanja dan Transfer Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Bali s.d. Triwulan II Tahun 2020 dan 2021

Uraian	Triwulan II 2020	Triwulan II 2021	Perubahan
Belanja Pemerintah	13.052,65	13.003,64	-0,38%
PDRB ADHB/Pert. Ekonomi	54,43	56,41	3,64%
Tingkat Kemiskinan (Mar '20 - Mar '21)	3,78%	4,53%	0,75%
Tingkat Pengangguran Terbuka (Feb '20 - Feb '21)	1,21%	5,42%	4,21%

Sumber: LRA Pemda Triwulan II Tahun 2021, BPS Provinsi Bali (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 4,21 poin menjadi 5,42% yang disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 di sektor pariwisata yang merupakan sektor utama di provinsi Bali. Namun, angka TPT per Februari 2021 tersebut telah turun dibandingkan kondisi Agustus 2020 yang sebesar 5,63%.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Tabel Analisis Kontribusi Pemerintah s.d. Triwulan II Tahun 2021 (*miliar rupiah*)

Kegiatan Operasional			
Pendapatan Operasional			**6.562,23**
Perpajakan			4.740,27
PNBP			1.845,77
Transfer			(153,67)
Lain-lain Pendapatan yang Sah			129,87
Beban Operasional			**11.218,77**
Beban Pegawai			5.848,24
Beban Barang dan Jasa			3.672,89
Beban Subsidi			5,00
Beban Hibah			617,08
Beban Bantuan Sosial			18,56
Beban Transfer			1.052,88
Beban Bunga			4,13
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional			**-4.656,54**
Kegiatan Non Operasional			-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			-
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional			**-4.656,54**
Kegiatan Non Operasional Lainnya			-
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya			-
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya			-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			**-4.656,54**
Surplus/(Defisit) LO			**-4.656,54**

Sumber: Om Span, LRA Pemda Triwulan II tahun 2021 (diolah)

Sampai dengan akhir Triwulan II 2021, Provinsi Bali tercatat mengalami defisit LO sebesar Rp4,66 triliun. Hal ini menandakan bahwa pendapatan yang diterima di Bali belum mampu membiayai seluruh belanja/beban yang ada. Total pendapatan dari kegiatan operasional tercatat sebesar Rp6,56 triliun yang bersumber dari pendapatan Perpajakan, PNBP, Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Jika dianalisis lebih lanjut, kontribusi tertinggi terhadap pendapatan dari kegiatan operasional bersumber dari pendapatan perpajakan, dengan rasio ketergantungan mencapai 72,24%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penggalian potensi pendapatan perpajakan di Bali cukup baik. Di sisi lain, beban operasional masih didominasi oleh Belanja Pegawai yang tercatat sebesar Rp5,85 triliun atau 52,13%.

Tabel Kontribusi Belanja Pemerintah s.d. Triwulan II Tahun 2021 (dalam triliun rupiah)

Uraian	TW II 2020	TW II 2021
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,69	13,00
PDRB ADHB / Pertumbuhan Ekonomi	54,46	56,41
Kontribusi Belanja Pemerintah thd PDRB	25,14%	23,05%

Sumber: Om Span, LRA Pemda triwulan II 2021, BPS Prov. Bali (diolah)

Kontribusi konsumsi pemerintah dalam PDRB di Provinsi Bali s.d. Triwulan II Tahun 2021 tercatat sebesar 23,05%, turun sebesar 2,09 poin dari periode yang sama di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa APBN dan APBD masih menjadi stimulus fiskal yang berbanding lurus terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Bali.

BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

5

HAnDAL

Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal

V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. SEKTOR PERTANIAN DI BALI MULAI PULIH

Sumber: *https://bali.bisnis.com/read/20210505/538/1390677/sektor-pertanian-di-bali-mulai-pulih-ini-datanya*, 5 Mei 2021 (Berita Terlampir).

Highlights berita:

> *Meskipun mulai pulih, tingkat kesejahteraan petani masih tertekan dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi pada 2019. Namun, dibandingkan 2020, sektor ini sudah mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik.*

Perekonomian Bali pada Triwulan II-2021 mengalami perbaikan yang cukup berarti, meskipun belum dapat dikatakan pulih. Pertumbuhan ekonomi secara *Year-on-Year* mencapai angka positif sebesar 2,83%, sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Triwulan I-2021), maka pertumbuhan ekonomi mencapai 5,73% *(q-to-q).* namun, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Bali Semester I-2021 masih mengalami kontraksi sebesar -3,73% *(q-to-q)* dibandingkan dengan Semester I-2020.

Pertumbuhan ekonomi tersebut utamanya masih berasal dari Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) dengan kontribusi sebesar 17,03%. Sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi kontributor terbesar kedua untuk PDRB dengan besaran 15,49%. Yang sangat menggembirakan dalam perkembangan ekonomi Bali di Triwulan II-2021 ini adalah hampir seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sendiri mengalami pertumbuhan sebesar 4,83% *(q-to-q).*

Tidak hanya menjadi salah satu kontributor utama dalam perekonomian, sektor pertanian di Bali merupakan sektor basis. Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan juga memiliki kontribusi paling besar terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan serapan 504.672 orang atau 20,43% dari jumlah tenaga kerja. Sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menduduki terbesar kedua dengan jumlah 495.672 tenaga kerja atau 20,05%.

Mengingat kontribusi dan potensi sektor pertanian yang cukup baik dan konsisten terhadap perekonomian tersebut, maka sektor pertanian diharapkan menjadi sektor yang diandalkan untuk menopang sektor pariwisata, terutama dalam kondisi pandemi. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah di Provinsi Bali diantaranya adalah percepatan pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir, percepatan implementasi sistem pertanian organik menuju Bali pulau organik, dan mengembangkan kedaulatan pangan. Namun, hal tersebut bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya adalah peningkatan luas tanam, peningkatan produktivitas, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Selain itu, hal penting yang akan

dicapai adalah peningkatan Nilai Tukar Petani hingga lebih dari 105, dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 25%.

Luas tanam dan produktivitas merupakan hal pertama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian. Namun, hal tersebut juga merupakan salah satu tantangan utama pertanian di Bali di tengah isu alih fungsi lahan, penurunan lahan pertanian, tingginya pencemaran, dan permasalahan dalam sistem pengairan. Hal ini dapat kita perhatikan pada komoditas padi sebagai komoditas terbesar dan tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Sebagaimana tampak pada Tabel berikut, secara umum terjadi penurunan baik pada luas panen, produktivitas, sekaligus produksi padi dalam tiga tahun terakhir. Ini tentu merupakan tantangan yang perlu menjadi perhatian serius untuk diselesaikan untuk memajukan pertanian Bali.

Tabel Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota (ha) di Provinsi Bali Tahun 2019-2020

No.	Kab/Kota	Luas Panen (Ha)			Produktivitas (Kuintal/Ha)			Produksi (Ton)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Kab. Jembrana	10.253	9.589	9.001	59,10	62,70	52,41	60.623	60.129	47.178
2	Kab. Tabanan	32.172	26.607	25.270	58,50	59,67	56,53	188.138	158.757	142.846
3	Kab. Badung	17.443	12.943	13.629	60,10	66,04	61,33	104.781	85.476	83.587
4	Kab. Gianyar	18.615	17.367	15.157	61,90	58,08	60,45	115.212	100.867	91.623
5	Kab. Klungkung	3.092	4.132	3.768	58,50	69,44	68,38	18.076	28.690	25.765
6	Kab. Bangli	3.132	2.588	2.737	50,40	51,78	49,78	15.789	13.401	13.626
7	Kab. Karangasem	7.496	6.846	6.979	63,90	59,34	58,76	47.904	40.625	41.010
8	Kab. Buleleng	13.070	12.798	11.289	59,90	57,14	55,66	78.323	73.121	62.836
9	Kota Denpasar	3.521	2.449	3.152	60,80	74,53	75,18	21.399	18.255	23.697
BALI		108.794	95.319	90.982	59,23	62,08	59,83	650.245	579.321	532.168

Sumber: BPS Provinsi Bali

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah, kualitas, dan daya saing produk-produk pertanian di Bali. Meskipun Bali memiliki beberapa komoditas pertanian yang cukup diandalkan, namun, Bali belum memiliki komoditas yang benar-benar menjadi andalan di tingkat nasional (terbesar dalam jumlah produksi atau terbaik dari sisi kualitas). Hal ini kemungkinan karena wilayah Bali yang tidak luas. Dalam kurun waktu 2012-2019, tercatat hanya dua produk yang termasuk tiga besar dalam ekspor komoditas nasional, yaitu perikanan tangkap; dan perburuan, penangkapan dan penangkaran satwa liar. Terlebih lagi, keterbatasan akses pemasaran produk pertanian juga menjadi kendala utama bagi para petani yang kesulitan untuk memasarkan produk pertaniannya ketika masa panen datang.

Selanjutnya, sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya tentang Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai salah satu indikator kesejahteraan, penetapan target Nilai Tukar Petani (NTP) lebih dari 105 dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 25% merupakan target yang tidak mudah dicapai dalam kondisi saat ini. Secara historis, NTP>105 bukan tidak mungkin untuk dicapai meskipun belum pernah mencapai angka tersebut. Namun, dengan kondisi pandemi saat ini, NTP terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 92,38 pada akhir Triwulan II-2021. Hal ini mengindikasikan

kesejahteraan petani yang terus menurun di tengah upaya untuk menjadikan sektor pertanian kembali menjadi unggulan Provinsi Bali. Dengan kata lain, melihat besaran NTP yang terus menurun tersebut, maka tentu akan sulit menjadikan sektor pertanian sebagai andalan untuk menunjang sektor pariwisata, apalagi untuk mewujudkan kontribusi sektor pertanian sebesar 25% terhadap PDRB.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa sektor pertanian bukan sektor yang tidak dapat dikembangkan. Sektor ini terbukti menyerap tenaga kerja paling besar. Selain itu, masih terdapat banyak jenis produk/komoditas yang dapat diandalkan, seperti: padi, kopi, ikan dan udang, hewan ternak (sapi/babi), dan lainnya. Sektor ini juga merupakan sektor basis yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Tetapi, perlu keseriusan dalam mewujudkan reformasi atau perbaikan di bidang pertanian dalam arti luas dan percepatan pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir, apalagi dalam kondisi ketidakpastian di tengah tekanan pandemi Covid-19. Sedangkan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan petani diantaranya dengan mengarahkan para petani untuk memanfaatkan lahan secara optimal termasuk lahan pekarangan yang mereka miliki, mendampingi petani untuk menanam dan menghasilkan produk yang lebih potensial, memastikan ketersediaan pupuk, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, serta mempermudah akses pemasaran (pasca panen) terutama ke pasar modern dan platform digital yang umum digunakan masyarakat.

B. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI BALI TETAP BERJALAN DI TENGAH PANDEMI

Sumber: *https://bali.bisnis.com/read/20210330/537/1374344/pembangunan-infrastruktur-di-bali-tetap-jalan-cek-capaiannya, 30 Maret 2021* (Berita Terlampir)

Highlights berita:

> *Di bidang infrastruktur, dalam situasi menurunnya kemampuan anggaran negara akibat pandemi Covid-19, Pemprov Bali bersama Pemerintah Pusat tetap dapat merealisasikan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang strategis, fundamental sekaligus monumental.*

Sampai dengan akhir Triwulan kedua tahun 2021 ini, perekonomian Bali masih belum mengalami perbaikan berarti akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan sejak awal tahun 2020, namun geliat pembangunan dan khususnya bidang infrastruktur terus dilanjutkan. Rata-rata capaian realisasi dari proyek-proyek strategis yang dilaksanakan di Bali telah mencapai 56,23%, bahkan, beberapa diantaranya telah mencapai 100%. Proyek-proyek tersebut diantaranya adalah pembangunan tiga pelabuhan besar yaitu Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Selain itu juga pembangunan Bendungan Sidan, Bendungan Tamblang, Embung Sanda, Embung Sanur, serta beberapa Preservasi Jalan/Jembatan. Proyek-proyek infrastruktur strategis yang merupakan bagian dari proyek prioritas nasional tersebut dibiayai dari APBN, APBD, atau gabungan dari keduanya. Selain itu, sebagian

diantara proyek-proyek tersebut adalah kegiatan yang bersifat *multiyears*, namun ada pula yang berlangsung hanya satu tahun anggaran.

Bidang infrastruktur merupakan bidang pembangunan yang terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Pusat. Hal ini diantaranya ditujukan untuk mendorong perekonomian, misalnya dalam pembangunan shortcut Singaraja-Mengwitani yang akan mempermudah akses transportasi antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Selain itu, beberapa proyek prioritas juga terus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan pengelolaan sistem pengairan yang lebih baik, misalnya dalam pembangunan embung/bendungan. Terlebih lagi, beberapa proyek dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kualitas infrastruktur, fasilitas ekonomi dan pariwisata, misalnya dalam pembangunan Pasar Sukowati, pembangunan Pelabuhan-pelabuhan strategis, dan juga penataan Kawasan wisata Pura Besakih.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Bali Perlu Terus Dilanjutkan

Kondisi ekonomi yang serba sulit tidak menyurutkan tekad Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Bali, untuk terus memperbaiki infrastruktur di Provinsi Bali. Hal ini juga merupakan salah satu langkah strategis untuk mendorong perekonomian Bali, termasuk untuk menunjang sektor pariwisata yang makin baik. Bahkan, apabila kita cermati kondisi pandemi dari sisi yang lain, maka kondisi ini merupakan peluang untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berbagai fasilitas, khususnya dalam aspek infrastruktur.

Ke depan, pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk mewujudkan transformasi perekonomian Bali yang lebih berimbang, sehingga diperlukan dukungan infrastruktur dasar, seperti pembangunan bandara Bali Utara, Shortcut Singaraja-Mengwitani, Tol Gilimanuk-Mengwi, Pelabuhan Benoa menjadi *Bali Maritime Tourism Hub*, Pelabuhan Segitiga Emas Sanur, serta LRT. Pengembangan pariwisata yang lebih berkualitas juga perlu didukung dengan pengembangan *medical Tourism* dan *Healing Journey*, sehingga pariwisata tidak hanya tentang berlibur atau rekreasi saja. Selain itu, pengembangan pariwisata modern dengan memberikan ruang kepada *digital nomad workers* juga masih menyimpan potensi yang sangat besar, apalagi beberapa lokasi di Bali seperti Canggu dan Ubud sudah sangat dikenal dunia.

Pembangunan Infrastruktur di Bali Tetap Jalan, Cek Capaiannya

Proyek infrastruktur tersebut meliputi pembangunan shortcut ruas Jalan Singaraja - Mengwitani di titik 7-8, pelabuhan segitiga Sanur-Nusa Penida, dan penataan Kawasan Suci Besakih.

Ni Putu Eka Wiratmini - Bisnis.com
30 Maret 2021 | 10:38 WIB

Bisnis.com, DENPASAR – Sejumlah proyek infrastruktur di Bali tetap dilanjutkan meskipun perekonomian sedang terhantam pandemi Covid-19.

Proyek infrastruktur tersebut meliputi pembangunan *shortcut* ruas Jalan Singaraja - Mengwitani di titik 7-8, pelabuhan segitiga Sanur-Nusa Penida, penataan Kawasan Suci Besakih, hingga pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung yang diawali dengan normalisasi Tukad Unda.

Adapun total anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan *shortcut* ruas jalan Singaraja-Mengwitani titik 7-8 menelan dana Rp193,5 miliar yang pendanaannya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Sementara itu, untuk pembangunan konstruksi titik 7 dan 8 dengan total anggaran Rp95 miliar bersumber dari APBN Kementerian PUPR.

Kemudian, pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan telah dimulai pada 2020 dengan target rampung pada 2022. Total anggaran yang dikeluarkan senilai Rp555 miliar yang bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan.

Pada 2020 juga dilaksanakan penataan kawasan suci Besakih yang dimulai dengan pembebasan lahan dengan total anggaran Rp174 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.

Pembangunan fisik akan dilaksanakan mulai 2021 dengan anggaran Rp784 miliar terdiri dari Rp276 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dan Rp508 miliar bersumber dari APBN Kementerian PUPR.

Selain itu, tahun lalu pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung diawali dengan normalisasi Tukad Unda dengan anggaran sebesar Rp270 miliar bersumber dari Kementerian PUPR dan pembebasan lahan (tahap 1) dengan anggaran sebesar Rp52 milyar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.

Pembangunan akan dilanjutkan pada 2021 sampai 2022 dengan anggaran Rp2,5 triliun bersumber dari pinjaman tanpa bunga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penandatanganan Perjanjian Pinjaman PEN sudah dilaksanakan tanggal 28 Desember 2020 di Jakarta.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan anggaran pendapatan pada 2020 direncanakan senilai Rp6,092 triliun, dengan realisasi Rp5,718 triliun atau 93,36 persen dari target. Sementara Anggaran Belanja Daerah yang direncanakan senilai Rp6,924 triliun, terealisasi Rp6,358 triliun atau 91,82 persen dari target.

Sejalan dengan realisasi anggaran tersebut, lanjutnya, implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang memasuki tahun ke-2 telah membuahkan sejumlah capaian.

"Di bidang infrastruktur, dalam situasi menurunnya kemampuan anggaran negara akibat pandemi Covid-19, Pemprov Bali bersama Pemerintah Pusat tetap dapat merealisasikan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang strategis, fundamental sekaligus monumental," katanya seperti dikutip dalam rilis, Selasa (30/3/2021).

Sektor Pertanian di Bali Mulai Pulih, Ini Datanya

Tingkat kesejahteraan petani masih tertekan dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada 2019. Namun, kondisi yang terjadi belakangan lebih baik dari sebelumnya.

Luh Putu Sugiari
Luh Putu Sugiari - Bisnis.com
05 Mei 2021 | 14:43 WIB

Bisnis.com, DENPASAR - Sektor pertanian di Bali mulai pulih. Indeks Nilai Tukar Petani pada April 2021 tercatat 92,12 atau naik 0,72 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Pemerhati Ekonomi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali M. Setyawan Santoso mengatakan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) secara relatif telah membaik. Hal ini menunjukan sektor pertanian mulai pulih setelah adanya pandemi Covid-19.

"Meskipun mulai pulih, tingkat kesejahteraan petani masih tertekan dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi pada 2019. Namun, dibandingkan 2020, sektor ini sudah mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik," kata dia kepada Bisnis, Rabu, (5/5/2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, kenaikan indeks NTP pada April 2021 tercatat pada hampir semua subsektor. Hanya subsektor tanaman pangan yang turun 2,75 persen.

Subsektor yang naik paling tinggi yaitu hortikultura sebesar 2,67 persen, disusul tanaman perkebunan rakyat 2,28 persen, perikanan 2,15 persen, dan peternakan 2,11 persen.

Indeks yang diterima petani (It) tercatat naik 0,86 persen atau lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,13 persen.

Menurut Setyawan indeks NTP ini memiliki peluang besar untuk tetap tumbuh positif pada periode selanjutnya.

Adapun, faktor yang mempengaruhi,yakni pertama harga beli petani (IHK) atau dikenal dengan inflasi. Inflasi ke depan diperkirakan terkendali di bawah level 3 persen, sehingga tidak menurunkan daya beli masyarakat termasuk petani.

Kedua, Indeks NTP dipengaruhi oleh harga jual petani yaitu harga jual produk-produk pertanian.

Ke depan Bali akan menghadapi masa panen untuk beberapa komoditas bahan pangan seperti padi dan beberapa jenis hortikultura seperti cabe.

Meskipun demikian, diperkirakan akan terjadi kenaikan pendapatan masyarakat sesuai dengan beberapa survei konsumen Bank Indonesia (SK). Survei menunjukkan terjadinya ekspektasi peningkatan pendapatan konsumen pada triwulan mendatang.

"Sehingga masa panen yang diiringi kenaikan permintaan akan menjaga harga jual pada posisi yang stabil," tambahnya.

Indeks Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada April 2021 turut mengalami kenaikan pada semua subsektor. Hanya subsektor tanaman pangan yang tercatat turun sedalam 3,06 persen.

Kenaikan NTUP tertinggi tercatat pada subsektor hortikultura sebesar 2,79 persen, disusul tanaman perkebunan rakyat 2,45 persen, perikanan 2,04 persen, dan peternakan 1,78 persen.

Pada April 2021, Pulau Dewata tercatat mengalami inflasi perdesaan sebesar 0,03 persen. Kondisi ini searah dengan catatan inflasi perdesaan secara nasional yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,27 persen.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI BALI

GEDUNG KEUANGAN NEGARA I
Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Niti Mandala Renon, Denpasar 80235
Telepon (0361) 235051, 225292, Pusat SMS: 08123806113
Faksimile (0361) 222844, Pos-el: kanwildjpbbali@kemenkeu.go.id
Situs: www.kanwilbali.djpbn.kemenkeu.go.id